



TAHUN 2024

RENCANA KERJA

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Sumatera



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA
NOMOR : SK.4401/BPPHLHK.I/TU/REN.2.1/12/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TAHUN
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.975/MENLHK/ SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
- c bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.719/SET.10/PEHKT/REN.2.3/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tahun 2024;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tentang Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2024 merupakan penyesuaian pelaksanaan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024
- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Balai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Kepala Balai,

Medhan

NIP. 19730320 199903 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Subhan, S.Hut., M.Si.

Penanggung Jawab :

Suhut Hesaki, S.Hut., M.Si.

Ketua :

Yulkhaidir Azis, S.H.

Anggota :

Sendra Bestari Anggun Charisma, S.E.

Husin, S.Pd.

Selpida Br. Ginting, A.Md.

Disusun oleh :

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, kreativitas, dan keahliannya dalam penyempurnaan dokumen Rencana Kerja.

Medan, Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (Balai PPHLHK Wilayah Sumatera) dalam jangka waktu satu tahun, yang selanjutnya menjadi dasar pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporannya. Selain itu, RENJA juga merupakan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, meliputi berbagai upaya dan keberhasilan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan pengamanan hutan.

Penyusunan RENJA ini berpedoman pada Rencana Strategis Balai PPHLHK Wilayah Sumatera periode 2020-2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja menjadi semangat penyusunan RENJA sebagai optimalisasi peran Balai PPHLHK Wilayah Sumatera di dalam maupun luar lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mitra pembangunan, dan masyarakat luas. Penetapan RENJA ini diharapkan juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.



Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera,

Subman, S.Hut., M.Si.

NIP. 19730320 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
I . PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	4
Gambar 1.1 Wilayah Kerja Lingkup Balai PPHLHK Sumatera	5
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai PPHLHK Sumatera	6
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Terpilah berdasarkan Pendidikan dan Range Usia	6
Gambar 1.3 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.4 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Status Kepegawaian	7
Gambar 1.5 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Status Kepegawaian dan Range Usia	7
Tabel 1.2 Sebaran SDM Terpilah Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	8
Tabel 1.3 Sebaran SDM Terpilah Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	8
D. Pengarusutamaan Gender	8
II . CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 s.d. 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	10
A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2022 dan Prognosis Tahun 2023	10
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 s.d. 2022	10
Tabel 2.2 Prognosis dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2023	10
Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Sektor dan Tipologi	11
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022 dan Prognosis Tahun 2023	12
Tabel 2.4 Perbandingan Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022	12
Gambar 2.1 Perbandingan Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022	12
Tabel 2.5 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022.....	13
Tabel 2.6 Prognosis dan Serapan Anggaran Tahun 2023.....	14
Gambar 2.2 Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja	14
III . RENCANA KERJA TAHUN 2024	15
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	15
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi, dan Komponen	19
Tabel 3.1 Pagu Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun Anggaran 2024	19
Gambar 3.1 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Program	19
Gambar 3.2 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Kegiatan	20
Gambar 3.3 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Sumber Dana	20
Gambar 3.4 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja	20
Tabel 3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi, dan Komponen	21
IV . PENUTUP	24
V . LAMPIRAN MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di level nasional dan instansi pusat antara lain (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, (3) Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Nasional untuk periode satu tahun, (4) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Renstra K/L, yang merupakan dokumen RPJMN K/L untuk periode lima tahun, dan (5) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau Renja K/L, yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahun.

RKP harus merujuk pada RPJMN dan selaras dengan RENJA K/L. Selaras dengan RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan RENJA K/L artinya penyusunan rancangan RKP harus memperhatikan rancangan RENJA K/L. RKP merupakan penjabaran dari RPJMN, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RENJA Balai Gakkum Sumatera Tahun 2024 adalah dokumen tahun kelima atau tahun terakhir di dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2020-2024 dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang kedelapan sejak penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2015.

Penjelasan Umum Renja Balai PPHLHK Sumatera ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Gakkum Sumatera, terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendefinisikan unit pelaksana teknis (UPT) sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri, yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai PPHLHK bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta dipimpin oleh Kepala.

Dalam melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Balai PPHLHK menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;

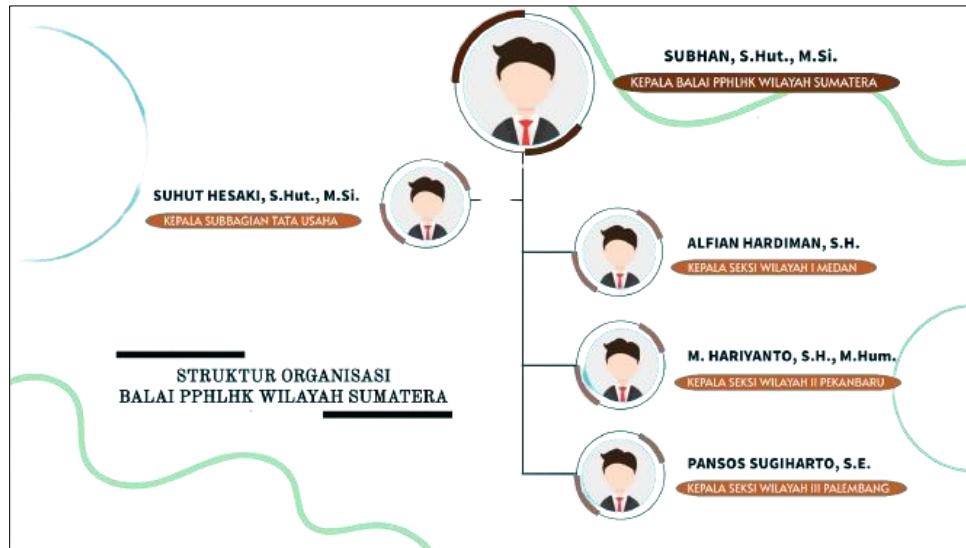
8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
10. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Lingkup Balai PPHLHK Sumatera



C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai PPHLHK Sumatera

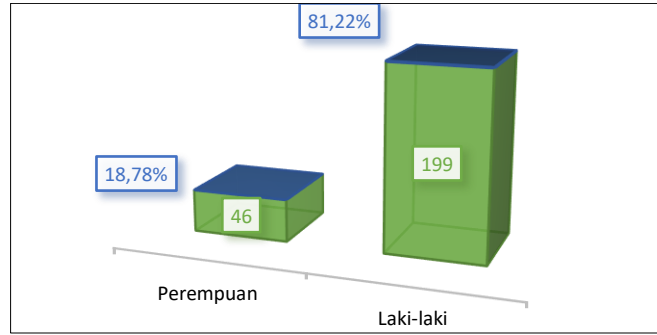


Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Terpilah berdasarkan Pendidikan dan Range Usia

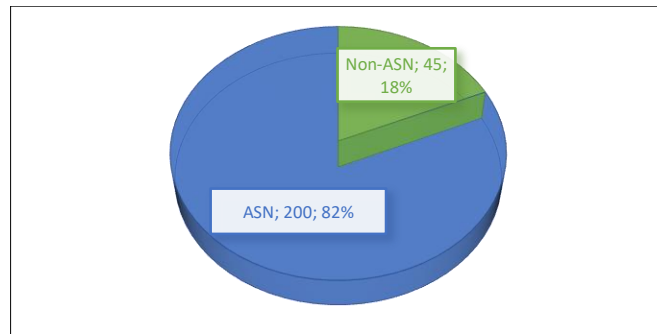
DATA TERPILAH	Usia ≤ 30 tahun		Usia 31-40 tahun		Usia 41-50 tahun		Usia 51-65 tahun		Total
	P	L	P	L	P	L	P	L	
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SMP	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA	3	-	1	-	1	-	-	-	5
	-	12	-	11	-	31	-	37	91
D3	4	-	4	-	2	-	-	-	10
	-	5	-	3	-	2	-	-	10
D4/S1	13	-	13	-	3	-	-	-	29
	-	14	-	27	-	18	-	18	77
S2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-	-	-	3	-	10	-	7	20
Total	20	31	19	44	7	61	0	63	245
	51		63		68		63		

*data kepegawaian per 29 Desember 2023

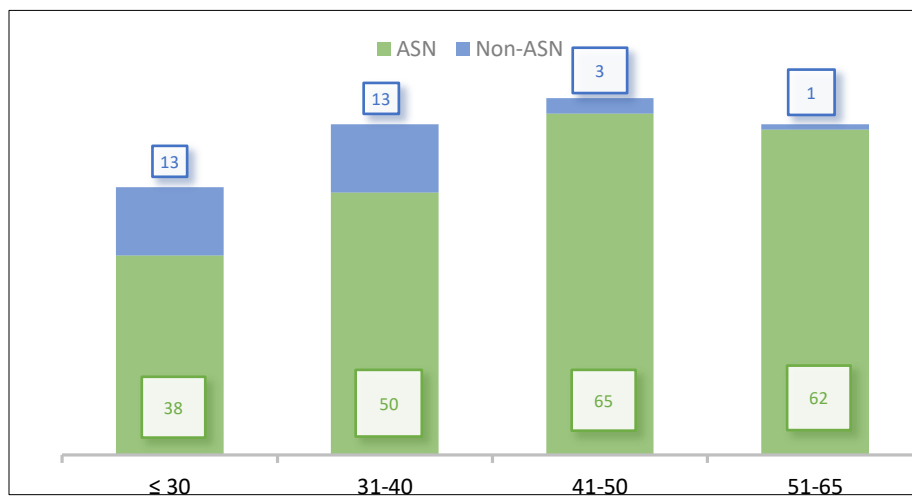
Gambar 1.3 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.4 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1.5 Sebaran SDM Terpilah berdasarkan Status Kepegawaian dan Range Usia



Tabel 1.2 Sebaran SDM Terpilah Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

DATA TERPILAH	Usia ≤ 30 tahun		Usia 31-40 tahun		Usia 41-50 tahun		Usia 51-65 tahun		Total
	P	L	P	L	P	L	P	L	
SMA	3	10	1	8	-	27	-	37	86
D3	3	4	-	-	-	2	-	-	9
D4/S1	-	3	1	14	3	17	-	12	50
S2	-	-	-	2	-	5	-	2	9
Total	6	17	2	24	3	51	-	51	154
	23		26		54		51		

Tabel 1.3 Sebaran SDM Terpilah Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

DATA TERPILAH	Usia ≤ 30 tahun		Usia 31-40 tahun		Usia 41-50 tahun		Usia 51-65 tahun		Total
	P	L	P	L	P	L	P	L	
D4/S1	10	4	5	3	-	2	-	1	25
S2	-	-	-	-	2	1	-	2	5
Total	10	4	5	3	2	3	-	3	30
	14		8		5		3		

D. Pengarusutamaan Gender

Selaras dengan 4 (empat) Prioritas dan Sasaran dalam *Roadmap* Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024, upaya-upaya untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan PUG secara terpadu dan terkoordinasi di Lingkup Balai PPHLHK Sumatera antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Staf untuk Mengimplementasikan *Practical Gender Concern* dalam wujud wadah percakapan yang berkontribusi pada peningkatan responsivitas gender serta komitmen terhadap anti-pelecehan dan eksploitasi seksual di lingkup Balai PPHLHK Sumatera.
2. Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender dalam wujud upaya penghapusan stereotip kepada peran dan kualitas serta penyediaan fasilitas seperti toilet terpisah antara perempuan dan laki-laki, ruang laktasi, tempat khusus untuk merokok, dan mekanisme pengaduan yang responsif gender.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan dalam wujud Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Sub Pokja PUG) yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang selanjutnya mendorong penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender.
4. Monitoring dan Evaluasi yang Responsif Gender dalam wujud mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat merespons perbedaan akses, partisipasi, maupun kontrol antara perempuan dan laki-laki sesuai tugas pokok dan fungsi serta pembinaan pengarusutamaan gender dalam kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

II . CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 s.d. 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2022 dan Prognosis Tahun 2023

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 s.d. 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHLHK	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
	Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
2	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	70 orang	120 orang	171,43%	40 orang	50 orang	100%
	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Kerusakan Lingkungan Hidup	200.000 hektar	614.379,47 hektar	307,19%	8 operasi	17 operasi	212,50%	7 operasi	7 operasi	100%
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan, dan Satwa Liar	16 operasi	25 operasi	156,25%	5 operasi	12 operasi	240,00%	11 operasi	11 operasi	100%
3	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	5 orang	4 orang	80,00%	5 orang	5 orang	100%
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	91 badan usaha	158 badan usaha	173,63%	96 badan usaha	124 badan usaha	129,17%	143 badan usaha	158 badan usaha	110,49%
5	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 orang	3 orang	100%	4 orang	2 orang	50,00%	4 orang	4 orang	1250,00%
	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21/Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap	45 perkara	49 perkara	108,89%	33 perkara	36 perkara	109,09%	46 perkara	50 perkara	108,70%

Tabel 2.2 Prognosis dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prognosis	Realisasi*	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHLHK	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%
	Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%
2	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 orang	15 orang	15 orang	120,00%
	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Kerusakan Lingkungan Hidup	11 operasi	12 operasi	12 operasi	109,09%
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan, dan Satwa Liar	4 operasi	9 operasi	12 operasi	120,00%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prognosis	Realisasi*	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	1 perkara	0 perkara	0 perkara	0%
4	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 orang	10 orang	10 orang	100%
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	180 badan usaha	180 badan usaha	132 badan usaha	73,33%
5	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang	5 orang	5 orang	100%
	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21/Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap	37 perkara	37 perkara	41 perkara	109,76%

*per 29 Desember 2023

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Sektor dan Tipologi

Kegiatan/Sektor/Tipologi	Target	Realisasi*
(1)	(2)	(3)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	15 operasi	24 operasi
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	11	12
Operasi Perambahan dan Penambangan Tanpa Izin	11	12
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4	12
Operasi Pembalakan dan Peredaran Kayu	2	4
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	2	8
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	180 badan usaha	132 badan usaha
Penanganan Pengaduan Perusahaan	70	82
Lingkungan Hidup		50
Kehutanan		32
Penanganan Pengaduan Non-Perusahaan	105 pengaduan	117 pengaduan
Lingkungan Hidup		24
Kehutanan		93
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	110	50
Industri, Prasarana, dan Jasa		21
Sumber Daya Alam		29
Sanksi Administrasi	-	-
Penegakan Hukum Pidana LHK	37 perkara	41 perkara
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK		41
Pembalakan Liar		18
Perambahan		11
Peredaran Illegal TSL		12

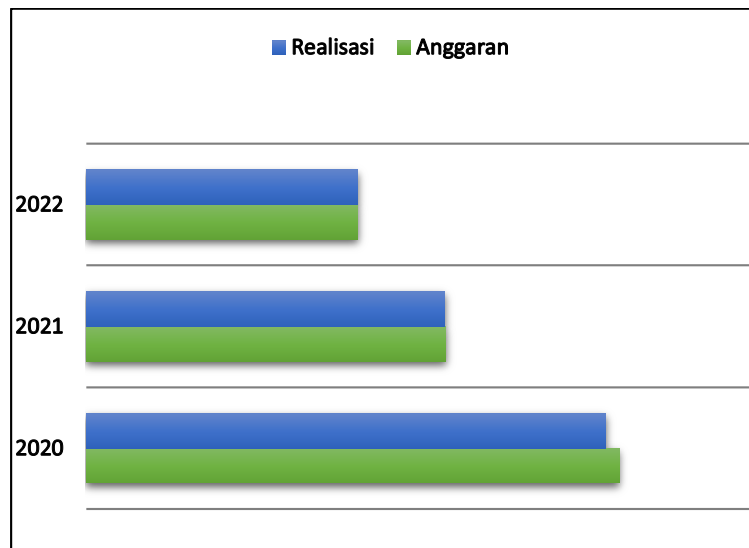
*per 29 Desember 2023

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Tabel 2.4 Perbandingan Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022

Keterangan	2020 (dalam Rp)	2021 (dalam Rp)	2022 (dalam Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Anggaran	50.799.805.000	45.655.211.000	43.051.645.000
Realisasi	50.407.900.695	45.633.205.008	43.031.483.127
Capaian	99,23%	99,95%	99,95%

Gambar 2.1 Perbandingan Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022



Tabel 2.5 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022

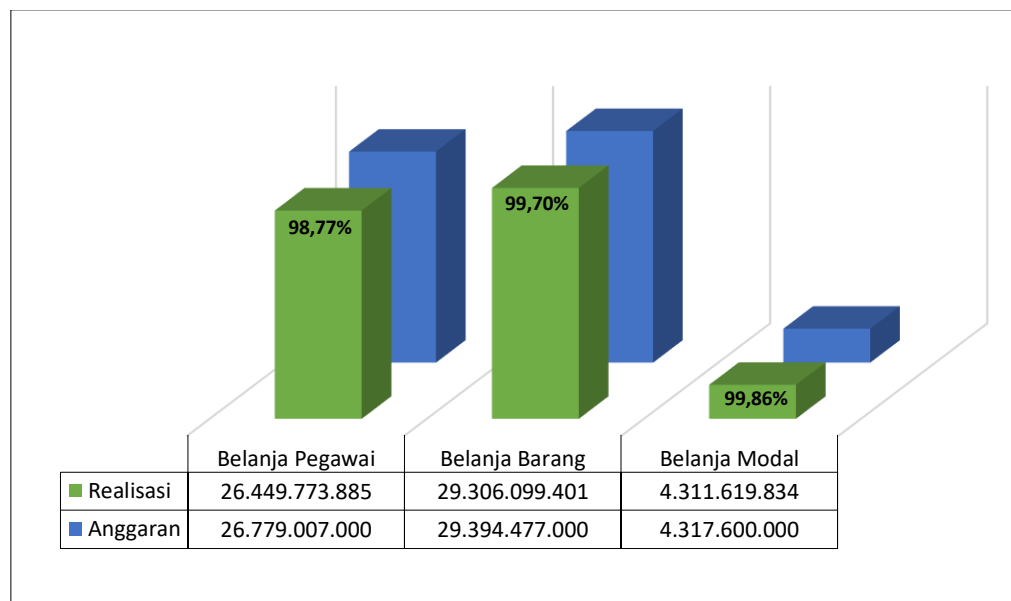
No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022		
		Anggaran (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Capaian	Anggaran (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Capaian	Anggaran (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Total Pagu Balai Gakkum Sumatera	50.799.805.000	50.407.900.695	99,23%	45.655.211.000	45.633.205.008	99,95%	43.051.645.000	43.031.483.127	99,95%
1	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	1.489.042.000	1.488.464.226	99,96%	955.402.000	955.252.832	99,98%	1.000.000.000	999.057.326	99,91%
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHLHK	26.744.359.000	26.406.599.614	98,74%	28.060.874.000	28.060.167.203	100,00%	30.164.840.000	30.158.460.876	99,98%
	Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	422.045.000	420.881.815	99,72%	224.100.000	223.620.600	99,79%
	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Kerusakan Lingkungan Hidup	5.263.010.000	5.255.574.437	99,86%	2.192.377.000	2.186.643.796	99,74%	1.718.665.000	1.715.980.506	99,84%
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan, dan Satwa Liar	3.425.912.000	3.408.712.213	99,50%	1.773.061.000	1.771.968.278	99,94%	1.959.732.000	1.958.445.717	99,93%
3	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	1.258.618.000	1.255.977.014	99,79%	40.000.000	39.946.892	99,87%
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	4.399.475.000	4.391.961.457	99,83%	2.312.439.000	2.310.832.711	99,93%	2.450.018.000	2.449.214.012	99,97%
5	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.315.197.000	1.302.979.340	99,07%	3.164.318.000	3.161.749.658	99,92%	24.000.000	23.787.047	99,11%
	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21/Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap	8.162.810.000	8.153.609.408	99,89%	5.516.077.000	5.509.731.701	99,88%	5.470.290.000	5.462.970.151	99,87%

Tabel 2.6 Prognosis dan Serapan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (dalam Rp)	Prognosis (dalam Rp)	Realisasi* (dalam Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total Pagu Gakkum Sumatera	60.491.084.000	59.888.069.350	60.067.493.120	99,30%
1	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	1.636.000.000	1.627.820.000	1.629.537.252	99,60%
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHLHK	32.374.700.000	31.882.604.560	32.038.121.285	98,96%
	Laporan Keuangan Ditjen PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	4.217.600.000	4.183.859.200	4.211.816.334	99,86%
2	Jumlah Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000.000	199.300.000	199.679.216	99,84%
	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Kerusakan Lingkungan Hidup	5.044.964.000	5.042.946.014	5.042.386.427	99,95%
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan, dan Satwa Liar	2.045.000.000	2.041.523.500	2.044.517.099	99,98%
3	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	1.000.000.000	980.000.000	980.645.235	98,06%
4	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100.000.000	99.200.000	99.625.700	99,63%
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	5.037.120.000	5.033.594.016	5.031.733.860	99,89%
5	Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20.000.000	18.548.000	18.967.736	94,84%
	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21/Berkas Perkara yang Dinyatakan Lengkap	8.815.700.000	8.778.674.060	8.770.462.976	99,49%

*per 29 Desember 2023

Gambar 2.2 Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja



III . RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi-Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan, dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.

Prinsip dasar pembangunan nasional antara lain (1) membangun kemandirian, (2) menjamin keadilan, dan (3) menjaga keberlanjutan. Keberlanjutan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan

kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. Ketersediaan sumber daya alam yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri sekaligus juga menjadi sumber devisa. Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi sumber daya alam lainnya, seperti hutan, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun 50% dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2017 menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku, khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Risiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6% pada tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana sangat tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti *illegal logging*, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa izin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan, kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, *illegal logging*, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSL).

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar Rp 7,3 triliun per tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar Rp 66,8 triliun per tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar, bahkan lintas batas wilayah administrasi, besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan, serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi tantangan utama Balai Gakkum Sumatera untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Balai maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah, Balai Gakkum Sumatera mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, potensi ancaman, potensi pelanggaran hukum; pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan; pencegahan dan operasi pengamanan hutan; pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Balai PPHLHK Wilayah Sumatera melaksanakan berbagai tindakan hukum secara konsisten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan budaya ketaatan dari pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Balai PPHLHK Wilayah Sumatera telah merencanakan beberapa target prioritas penanganan kasus dan perkara di tahun 2024 di antaranya:

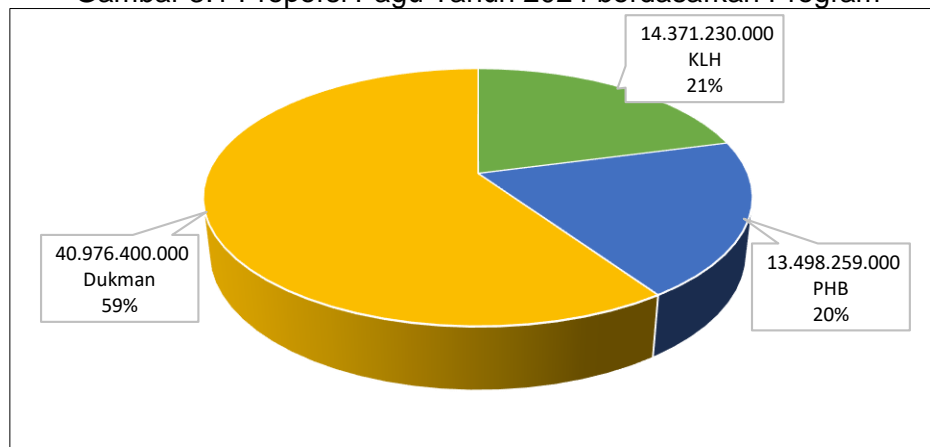
1. Pembalakan Liar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal), Jambi, Riau dan Lampung;
2. Pertambangan Ilegal di Provinsi Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal), dan Sumatera Selatan;
3. Perambahan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Aceh (SM. Rawa Singkil), Sumatera Barat dan Bangka Belitung;
4. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jambi;
5. Tumbuhan dan Satwa Liar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung;
6. Penyidikan di Nagan Raya dan Deli Serdang; dan
7. Penanganan barang bukti di Batam.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi, dan Komponen

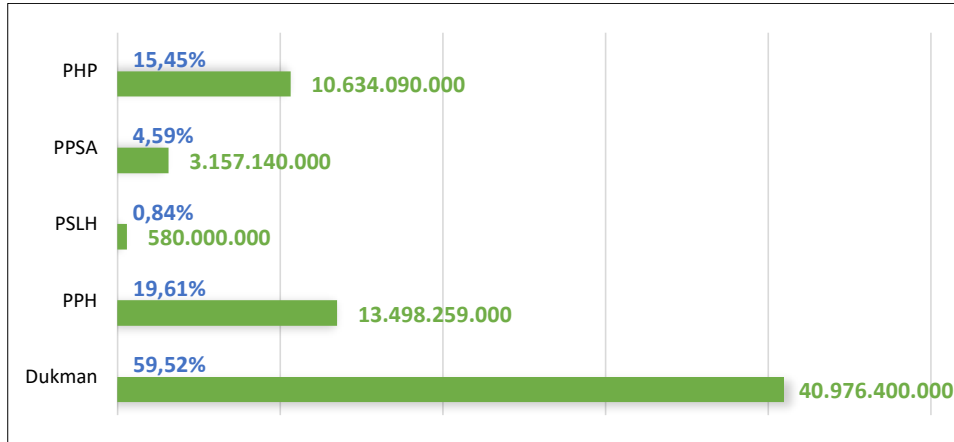
Tabel 3.1 Pagu Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	KRO	Target dan Satuan	Anggaran (dalam Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pagu Alokasi Balai Gakkum Sumatera 2024				68.845.889.000
WA-Program Dukungan Manajemen				40.976.400.000
1	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	37.454.700.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 unit	3.521.700.000
FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				13.498.259.000
2	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15 orang	200.000.000
		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	38 operasi	13.298.259.000
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup				14.371.230.000
3	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	2 perkara	580.000.000
4	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	99 badan usaha	3.157.140.000
5	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Perkara	42 perkara	10.634.090.000

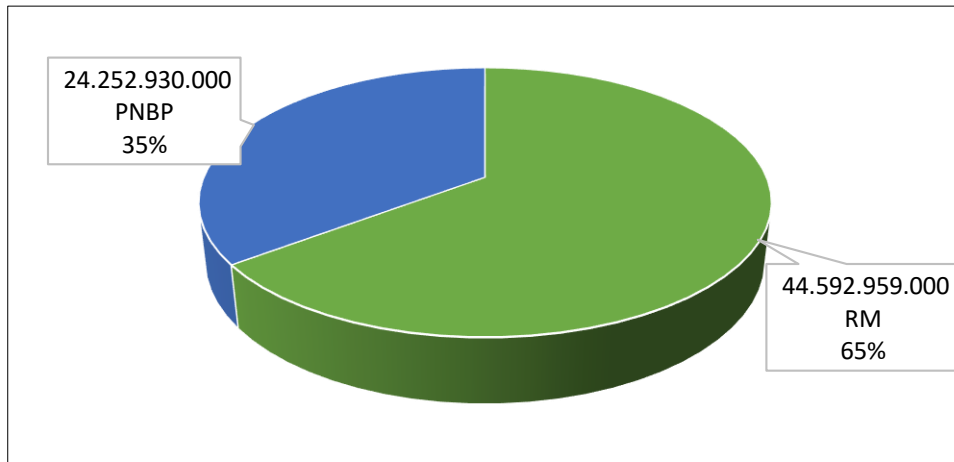
Gambar 3.1 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Program



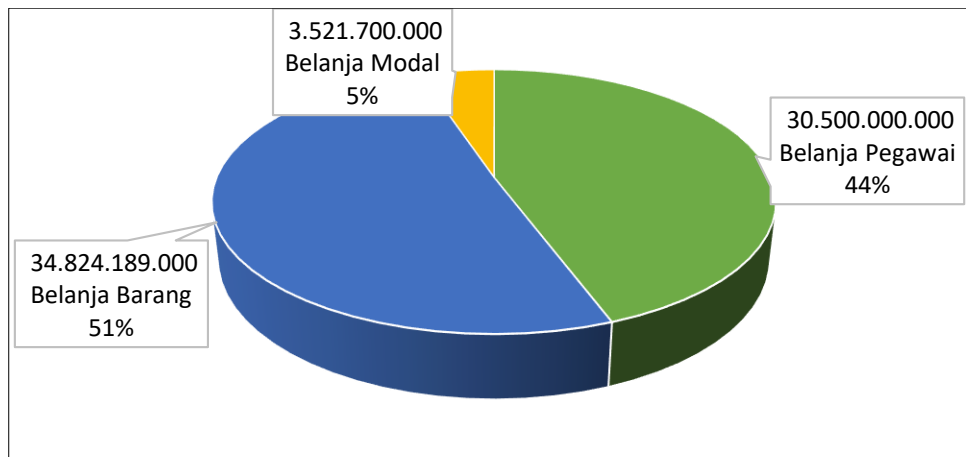
Gambar 3.2 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Kegiatan



Gambar 3.3 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Sumber Dana



Gambar 3.4 Proporsi Pagu Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja



Tabel 3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi, dan Komponen

**waktu dan lokasi bersifat tentatif*

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
WA-Program Dukungan Manajemen								
1	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	Kota Medan	062-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan
			Nilai maturitas SPIP Ditjen PHLHK		994-Layanan Perkantoran	Kota Medan	001-Gaji dan Tunjangan	
				Laporan keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	Kota Medan	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor
			051-Pengadaan Kendaraan Bermotor					1 unit
			052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					1 unit
			053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					1 unit
			054-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 unit				
FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
2	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup, dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	051-Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	15 orang
			Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	
						Kabupaten Kaur, Kabupaten Tanjungpinang, Kabupaten Tulang Bawang	052-Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	20 operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan, dan satwa liar		002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang	051-Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pekanbaru	053-Sosialisasi dan Kerja Sama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	
						Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	054-Operasi Pembalakan Liar	9 operasi
						Kabupaten Bangka, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pasaman	055-Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	9 operasi
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang	057-Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup								
3	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	
						Kota Padang, Kota Bengkulu, Kota Palembang	052-Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	
						Kota Batam, Kota Padang, Kabupaten Asahan	053-Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	2 perkara
4	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan	Meningkatnya pelaku usaha/atau kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi	051-Penanganan Pengaduan Perusahaan	51 badan usaha
						Kabupaten Kaur, Kabupaten Tanjungpinang, Kabupaten Tulang Bawang	052-Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	053-Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48 badan usaha
5	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas	QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P-21	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		diselesaikan sampai dengan P-21	perkara yang dinyatakan lengkap			Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	052-Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	42 perkara
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	053-Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	
						Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	054-Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	
						Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pekanbaru	055-Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	

IV . PENUTUP

RENJA Tahun 2024 ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam melaksanakan berbagai tugas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, RENJA Tahun 2024 ini menjadi media yang tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2023, tetapi juga memuat komitmen untuk melanjutkan pencapaian pembangunan tahun 2024 serta diharapkan kemanfaatannya dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2024.

V . LAMPIRAN MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

**waktu dan lokasi bersifat tentatif*

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran (dalam Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pagu Alokasi Balai Gakkum Sumatera 2024									68.845.889.000
WA-Program Dukungan Manajemen									40.976.400.000
1	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	Kota Medan	062-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	1.700.000.000
							001-Gaji dan Tunjangan		30.500.000.000
			Nilai maturitas SPIP Ditjen PHLHK	994-Layanan Perkantoran	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.254.700.000	
						051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 unit	1.000.000.000	
			Laporan keuangan Ditjen PHLHK yang tertib dan akuntabel	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	Kota Medan	052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 unit	87.000.000
							053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 unit	1.127.700.000
							054-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 unit	1.307.000.000
FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									13.498.259.000
2	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup, dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	051-Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	15 orang	200.000.000
			Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan		2.356.956.000
						Kabupaten Kaur, Kabupaten Tanjungpinang, Kabupaten Tulang Bawang	052-Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	20 operasi	4.842.000.000

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran (dalam Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan, dan satwa liar		002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang	051-Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		2.020.248.000
						Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pekanbaru	053-Sosialisasi dan Kerja Sama Pencegahan dan Pengamanan Hutan		150.000.000
						Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	054-Operasi Pembalakan Liar	9 operasi	1.831.005.000
						Kabupaten Bangka, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pasaman	055-Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	9 operasi	1.498.050.000
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang	057-Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan		600.000.000
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup									14.371.230.000
3	5429- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	QCE- Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH		240.000.000
						Kota Padang, Kota Bengkulu, Kota Palembang	052-Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat		60.000.000
						Kota Batam, Kota Padang, Kabupaten Asahan	053-Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	2 perkara	280.000.000
4	5430- Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Meningkatnya pelaku usaha/atau kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi	051-Penanganan Pengaduan Perusahaan	51 badan usaha	810.900.000
						Kabupaten Kaur, Kabupaten Tanjungpinang, Kabupaten Tulang Bawang	052-Penanganan Pengaduan Non Perusahaan		957.600.000
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	053-Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48 badan usaha	1.388.640.000

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran (dalam Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara yang dinyatakan lengkap	QCE- Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P-21	Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Asahan Kabupaten Solok	051-Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK		4.264.400.000
						Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	052-Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	42 perkara	4.887.960.000
						Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang	053-Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK		781.730.000
						Kabupaten Merangin, Kabupaten Banyuasin, Kota Batam	054-Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK		500.000.000
						Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pekanbaru	055-Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK		200.000.000